

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara dapat dikatakan maju apabila mampu membangun negaranya baik dari segi pembangunan maupun kesejahteraan rakyatnya. Indonesia terkenal sebagai suatu negara yang kaya akan sumber daya alam, maka dalam melaksanakan pembangunan sumber daya itu harus digunakan secara rasional dalam pelaksanaan pembangunan. Perubahan pola hubungan yang terjadi antara pusat dan daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah memberikan implikasi yang cukup signifikan, antara lain dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah otonom akibat dijalankannya desentralisasi. Regulasi ini menjanjikan pendelegasian wewenang yang lebih besar bagi daerah, terutama daerah kabupaten atau kota. Tujuan idealnya, memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan, daerah yang adil, proposional dan transparan,

mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan dan partisipasi serta mengurangi kesenjangan antardaerah.¹

Kabupaten Pandeglang kini tidak lagi menyandang sebagai status daerah tertinggal. Karena berdasarkan keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2015-2019.

Pendapatan asli daerah menurut permendagri No.21 Tahun 2011 dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.² Pada tahun 2016, dana perimbangan menyumbang sekitar Rp. 1,7 triliun atau 75% dari total pendapatan Rp. 2,2 triliun. Sementara kontribusi PAD hanya menyumbang 9% atau sekitar Rp. 198,7 miliar. Dari minimnya kontribusi PAD, pajak daerah hanya menyumbang Rp. 33,73 miliar atau 17% dari total PAD. Kontribusi tertinggi diberikan oleh sumber PAD lain-lain yang sah

¹Khairul Ikhwan Damanik. Tikwan Raya Siregar, dkk, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h. 1

²Erlina dan Omar Sakti, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h 111

dengan pencapaian 41%. Sisanya disumbang oleh retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.³

PAD Kabupaten Pandeglang berpotensi tidak akan tercapai, karena baru mencapai 75% dari total Rp. 1,2 miliar yang ditargetkan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang pada tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh terminal tipe B yang berlokasi di Labuan kewenangannya diambil alih oleh pusat sehingga PAD Dishub Pandeglang mengalami penurunan. Terminal tipe C Carita juga mengalami kendala *human error* karena banyak pengendara yang tidak masuk terminal dan menyetorkan retribusi ke Dishub.⁴ Dalam tiga tahun terakhir pendapatan asli daerah kabupaten pandeglang mengalami ketidakstabilan data setiap bulannya yang diakibatkan oleh naik turunnya data yang masih di dominasi kenaikan data, berikut uraiannya:

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah⁵

No	Bulan	2017	2018	2019
1	Januari	2.354.658.366	3.893.174.158	4.618.244.900
2	Februari	5.036.433.647	4.109.729.362	4.482.707.845

³Kontribusi Setoran Pajak Terhadap PAD Masih Minim, news.ddtc.co.id, 11 Juli 2020.

⁴Sumber Informasi Rakyat Pandeglang, *PAD di Dinas Perhubungan Pandeglang Berpotensi Tak Tercapai*, faktapandeglang.co.id, 11 Juli 2020

⁵Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2017-2019*, (Pandeglang, 3 Desember 2019)

No	Bulan	2017	2018	2019
3	Maret	17.125.204.286	19.882.400.009	8.636.189.188
4	April	20.355.037.116	25.057.312.402	43.258.288.814
5	Mei	24.340.518.003	25.717.100.167	25.003.268.960
6	Juni	44.957.136.818	29.541.502.842	59.797.631.748
7	Juli	30.578.486.428	49.437.373.911	51.507.664.757
8	Agustus	52.903.644.510	38.418.648.355	-
9	September	39.241.269.766	59.189.484.319	-
10	Oktober	78.079.150.461	67.148.683.825	-
11	November	45.109.791.801	66.715.128.384	-
12	Desember	130.709.623.112	130.281.678.613	-
Jumlah		490.790.954.314	519.392.216.347	197.303.996.212

Sumber: Sumber: Data asli Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2017-2019 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang

Dari data di atas, walaupun PAD mengalami kenaikan pada tahun 2017-2018 tetapi PAD Kabupaten Pandeglang berkontribusi paling rendah terhadap total pendapatan daerah (TPD) dibandingkan DBH, DAK, DAU. Dalam APBD tahun 2019 dari TPD sebesar Rp. 2,56 triliun, PAD hanya mampu berkontribusi sebesar 215,3 miliar atau baru 8,5% dari TPD. Kondisi ini membuat Kabupaten Pandeglang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pusat. Karena belum seimbangannya antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*), sehingga memunculkan celah fiskal (*fiscal gap*) yang dalam hal ini ditutupi oleh pemerintah

pusat melalui kebijakan dana perimbangan yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal horizontal (*horizontal fiscal imbalance*).⁶

Untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini. Upaya menciptakan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Dari berbagai sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, undang-undang tentang pemerintah daerah dan pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata serta menggenjot pendapatan pajak hotel dan restoran. Keterkaitan industri pariwisata dengan

⁶Keluar dari status tertinggal, *PAD Kabupaten Pandeglang jadi sorotan*, Radio Republik Indonesia.co.id, 6 Januari 2020.

penerimaan daerah berjalan melalui jalur PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak.

Pandeglang memiliki banyak daya tarik wisata yang telah berkembang dan beberapa daya tarik wisata sangat potensial untuk dapat dikembangkan. Walaupun Pandeglang saat ini sudah memiliki destinasi wisata yang dikenal dunia, Dinas Parawisata Pandeglang bersama masyarakat terus mengembangkan destinasi wisata baru, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Muharsono *et al.* (2016) menyatakan bahwa Pendapatan Daerah merupakan indikator yang menjadi barometer keberhasilan desentralisasi fiskal di Indonesia.⁷

Untuk mendukung kegiatan parawisata, perlu disiapkan tempat persinggahan bagi para wisatawan dalam hal ini berupa hotel, villa, restoran maupun rumah makan. Hotel dan restoran merupakan hal mutlak yang perlu disediakan bagi daerah tujuan wisata khususnya di Kabupaten Pandeglang sebagai pelengkap paket wisata. Jumlah hotel dan restoran cukup memadai di Kabupaten Pandeglang. Dengan karakteristik Kabupaten

⁷Anak Agung Gde Suarjana dan Nyoman Indah, “Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Giayar-Bali”, *Jurnal Binsis dan Kewirausahaan* Vol. 15 No. 1 (Maret 2019), h. 40

Pandeglang yang mendukung serta dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, maka hotel dan restoran dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah melalui sektor pajak.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 1 bagian umum tentang pembagian kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta penjelasan tentang pembagian pajak dan penjelasan tentang masing-masing pajak, salah satu contohnya adalah pajak hotel dan pajak Restoran.⁸

Sejak tahun 2008-2017 kunjungan wisatawan di Pandeglang selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2008 jumlah kunjungan wisatawan mencapai 804.774 dan pada tahun 2017 sudah mencapai angka 3.833.001 tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan dengan jumlah kunjungan sebesar 3.105.051 data ini diperoleh langsung mengunjungi dinas pariwisata Kabupaten Pandeglang dan mendapatkan data dalam bentuk dokumen.⁹ Pajak hotel dan restoran mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan yaitu pada tahun 2017 sebesar

⁸Marihot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 299

⁹Dinas Pariwisata, *Data Kunjungan Wisatawan 2008-2018*, (Pandeglang, 11 November 2019)

5.391.515.138 dan pada tahun 2018 sebesar 5.662.897.821 data ini diperoleh langsung mengunjungi kantor pelayanan pajak daerah Pandeglang dan mendapatkan data dalam bentuk dokumen.¹⁰

kenaikan kunjungan wisatawan dan pajak hotel dan restoran diikuti dengan kenaikan PAD disetiap tahunnya. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Pandeglang berharap ke depannya PAD terus dapat ditingkatkan dengan melakukan inovasi.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek dan periode yang digunakan, objek pada peneliti sebelumnya yaitu Kabupaten Gianyar-Bali periode 2007-2017. Sedangkan pada penelitian ini objeknya adalah Kabupaten Pandeglang periode 2017-2019. Hal ini yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian ini dengan judul Pengaruh Kunjungan Wisatawan Serta Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kunjungan wisatawan, pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pandeglang.

¹⁰Badan Pelayanan Pajak Daerah, *Rekapitulasi Penerimaan Pajak 2017 dan 2018*, (Pandeglang, 11 November 2019)

B. Identifikasi Masalah

Pada penelitian kali ini masalah yang dihadapkan adalah apa saja yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang.

1. Menurunnya kunjungan wisatawan di Pandeglang tahun 2018.
2. Menurunnya pendapatan pajak hotel dan restoran di Pandeglang setelah Tsunami Selat Sunda tahun 2018.
3. Masih melemahnya perekonomian Kabupaten Pandeglang terutama pada Pendapatan Asli Daerah.
4. Pandeglang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pusat.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, fokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Dengan demikian peneliti akan membatasi penelitian ini pada:

1. Fokus penelitian hanya mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kunjungan Wisatawan serta Pajak Hotel dan Restoran.

2. Penelitian dilakukan di Pandeglang pada tahun 2017-2019 menggunakan data perbulan yaitu 2017- 2018 dan pada tahun 2019 hanya pada bulan Januari- Juni saja.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berisi tentang pernyataan-pernyataan dan jawaban yang akan ditemukan dalam penelitian yang dilakukan. Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas maka perumusan masalah yang dapat diambil sebagai dasar kajian dalam peneltiian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pandeglang?
3. Bagaimana pengaruh kunjungan wisatawan serta pajak hotel dan restoran secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pandeglang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pandeglang.
3. Untuk mengetahui pengaruh kunjungan wisatawan serta pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pandeglang.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMH Banten, terutama bagi mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.
2. Sebagai masukan bagi kalangan akademisi dan peneliti yang tertarik membahas tentang Pengaruh Kunjungan Wisatawan Serta Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang.
3. Sebagai tambahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang mengambil bahan yang sama di masa mendatang.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian singkat secara garis besar mengenai hal-hal pokok yang dibahas guna mempermudah dalam memahami serta melihat hubungan antara satu bab dan bab yang lainnya. Adapun uraian dalam tiap bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang masalah, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang Kunjungan Wisatawan, Pajak Hotel dan Restoran dan Pendapatan Asli Daerah. Hubungan antar variabel dan Hipotesis Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang Tempat dan waktu penelitian, Ruang Lingkup, Populasi & Sampel, Instrument penelitian dan Teknik Data.

BAB IV DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Deskripsi Data, Uji Persyaratan Analisis, Pengujian Hipotesis dan Pembahasan Hasil Penelitian

BAB V PENUTUP

Menyajikan secara singkat apa yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terangkum dalam bagian simpulan. Bab ini diakhiri dengan pengungkapan keterbatasan penelitian diikuti saran yang berguna untuk penelitian selanjutnya

